

# Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lawang Kidul

Inne Miftah Dewi<sup>1\*</sup>, Lisdiana<sup>1</sup>, Ickuk M. Sakir<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STISIPOL Candradimuka, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 04 Juni 2024  
Accepted 30 Agustus 2024  
Available online 31  
Desember 2024

### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;  
Program Keluarga Harapan;  
Kualitas Taraf Hidup;  
Keluarga Sangat Miskin

### Keywords:

Policy Implementation;  
Prospect Family  
Program; Life Quality;  
Poorest Family

## ABSTRAK

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup Keluarga Sangat Miskin. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan untuk mengetahui bentuk Program Keluarga Harapan Kecamatan Lawang Kidul. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementasi kebijakan *Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Lawang Kidul berjalan dengan baik walaupun mengalami beberapa kendala. Dalam pelaksanaan PKH Kecamatan Lawang

Kidul sudah cukup baik namun akan lebih baik jika ada penambahan pendamping agar dapat membantu PKH lebih maksimal, dilakukan permutakhiran data dan verifikasi data secara benar sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Dan diharapkan kepada para peserta atau KPM, dana bantuan yang didapat dari PKH di Kecamatan Lawang Kidul dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

## ABSTRACT

One of the policies carried out by the government to decrease poverty is the Conditional Cash Assistance Program known as the Prospect Family Program (PKH). PKH is to increase quality of the poorest family. A goal of research is to find out the implementation of Family Prospect Program (PKH) and to find out any form of Prospect Family Program (PKH) in Lawang Kidul Muara Enim Regency. This research approach used theory of policies implementation by *Daniel Mazmanian and Paul Sabatier* and this research used descriptive method with qualitative approach. Collecting data in this research by doing observation, interview, and documentations. The result of this research show that policies implementatation in Lawang Kidul have done well with althought there is some problems.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [innemiftah@gmail.com](mailto:innemiftah@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi tantangan di setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat kesulitan yang dihadapi berbeda-beda. Kemiskinan dapat diartikan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan dan non pangan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial, sehingga kemiskinan bersifat relatif dan berbeda di setiap individu (Hermawati, 2015). Sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu perbincangan terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia juga menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya, yang tercantum dalam pembukaan UU 1945 pada pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa kemakmuran rakyat lebih diutamakan di atas kemakmuran perseorangan, dan negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar.

**Tabel 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	28.005.39	10,7
2017	27.771.22	10,12
2018	25.949.80	9,66
2019	25.144.72	9,22
2020	26.424.02	10,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 27.771.22 (ribu) menjadi 25.949.80 (ribu). Akan tetapi, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020 26.424.02 dari 25.144.72 pada tahun 2019 dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 10,19 persen. Peningkatan jumlah persentase penduduk miskin tahun 2020, terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Di daerah pedesaan, angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, dengan persentase sebesar 13,20%, sedangkan daerah perkotaan sebesar 7,88%. Wilayah dengan tingkat kesejahteraan terendah berada di Papua tepatnya di daerah Intan Jaya dan Deiyai (BPS: 2020).

Permasalahan kemiskinan yang masih menjadi fokus di Indonesia adalah terbatasnya akses Pendidikan dan layanan Kesehatan. Di daerah pedesaan atau daerah terpencil, akses ke Pendidikan dan Kesehatan terbatas karena beberapa hal antara lain seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya tenaga pengajar maupun tenaga medis di daerah tersebut sehingga sangat sulit untuk dijangkau Masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta penyebaran penyakit yang seharusnya dapat dicegah.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa program dan stimulus terutama di daerah pedesaan. Beberapa program tersebut yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa, serta Program Padat Karya. Salah satu program khusus yang diluncurkan pemerintah adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang juga dikenal di dunia dalam mengurangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial termasuk sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940).

Sasaran Bantuan dana PKH berfokus pada pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan untuk memajukan taraf hidup keluarga Penerima Manfaat dengan

memberikan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan syarat yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya akses ini, diharapkan ada perubahan perilaku yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Sasaran PKH yaitu keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH yang terakses dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang dibedakan berdasarkan beberapa komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia telah merealisasikan PKH sejak tahun 2007 dan dengan jumlah peserta atau penerima manfaat yang terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini, PKH sudah melangsungkan di 34 Provinsi seluruh Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Muara Enim baru terealisasi pada tahun 2014. Di Kabupaten Muara Enim sendiri para penerima manfaat sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Muara Enim termasuk Kecamatan Lawang Kidul. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Lawang Kidul mencapai 72.123 jiwa diantaranya 36.505 jiwa laki-laki dan 35.618 jiwa perempuan (BPS: 2020). Kecamatan Lawang Kidul merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Maura Enim. Sebagian penduduk Kecamatan Lawang Kidul bekerja di sektor pertambangan batubara, Sebagian lainnya bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta ada pula yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa.

**Tabel 2** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muara Enim 2016-2020

Tahun	Sumatera Selatan	Muara Enim
2016	68,24	66,71
2017	68,86	67,63
2018	69,39	68,28
2019	70,02	68,88
2020	70,01	68,74

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim Dalam Angka (2021)

Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa IPM Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 sebesar 66,71 artinya IPM sedang sedangkan pada taun 2020 terjadi peningkatan sebesar 68,74 yang artinya IPM termasuk sedang. Dengan demikian menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Muara Enim masih berda di level sedang. Ketertarikan peneliti menentukan wilayah penelitian karena Kecamatan Lawang Kidul merupakan salah satu yang meemiliki potensi alam yang besar di sektor pertambangan batu bara. Sektor pertambangan batubar menjadi sektor unggulan di kecamatan ini, dengan PT Batubara Bukit Asam sebagai BUMN yang mengelola tambang dan sektor ini juga menjadi penerimaan terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Muara Enim serta mendominasi struktur ekonomi di daerah ini.

Kemudian, salah satu indikator kesejahteraan adalah kualitas kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi sangat penting. Kondisi kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Lawang Kidul terbilang cukup. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Enim sebanyak 3 orang dokter, 33 orang perawat, 37 bidan. Untuk menunjang kesehatan masyarakat di Lawang Kidul terdapat sarana yang cukup l yaitu 1 rumah sakit, 4 poliklinik, 1 puskesmas, 6 puskesams pembantu dan 16 apotek. Selain itu, terdapat 60 posyandu yang tersebar di seluruh desa/kelurahan.

Salah satu indikator yang difokuska dalam program PKH adalah kualitas pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam strategi pembangunan untuk mengentas kemiskinan. Melalui peningkatan pendidikan, penduduk mendapat kesempatan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, pada tahun 2020 di Kecamatan Muara Enim terdapat 29 Sekolah Dasar Negeri yang tersebar disetiap desa dan kelurahan. Dan terdapat 8 SMP Negeri serta terdapat 3 SMA dan SMK di desa Keban Agung, Kelurahan Tanjung Enim dan Pasar Tanjung Enim. Selain itu, terdapat 4 SMK yang hanya terdapat di kelurahan Tanjung Enim, Desa Tegal Rejo dan Lingga serta untuk perguruan tinggi dan akademi belum ada di Kecamatan ini.

Menurut salah satu pendamping PKH di Kecamatan Lawang Kidul, dalam pelaksanaan program PKH masih banyak menemukan hambatan. Salah satunya tingkat partisipasi dari masyarakat masih rendah. Contohnya masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan melakukan protes ke pihak terkait kenapa tidak mendapatkan bantuan, penerima manfaat penerima PKH yang sebelumnya menerima dana di pendidikan harus berhenti karena anak putus sekolah dan melakukan pernikahan padahal penerima termasuk warga yang kurang mampu, kemudian kebanyakan penerima PKH dana bantuan dipakai untuk konsumsi dan keperluan lainnya.

Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ada hambatan pada saat pendamping berada di lapangan karena jarak dan daerah tempat penerima jauh dari pusat kota sehingga sering terjadi keterlambatan mengirim laporan dan pada saat menginput data hasil lapangan ke sistem lambat karena terhalang jaringan internet yang buruk. Dari gambaran diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut proses pelaksanaan Program keluarga Harapan berlokus pada wilayah Kecamatan Lawang Kidul . Maka penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”.

## 2. Metode

Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data mengaplikasikan model Miles dan Huberman yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Informan yang menjadi sumber informasi bagi peneliti yaitu: Operator UPPKH Kabupaten Muara Enim, Koordinator UPPKH Kecamatan Lawang Kidul, Pendamping UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) dan Para peserta PKH atau penerima PKH. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lawang Kidul Kabuptaen Muara Enim dengan pendekatan model implementasi *Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier*

## 3. Hasil dan pembahasan

Kecamatan Lawang Kidul termasuk ke dalam wilayah administrasi di Kabupaten Muara Enim yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1996 berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Sebelumnya, wilayah Kecamatan Lawang masih termasuk ke wilayah Kecamatan Tanjung Agung.

### Desa Penerima PKH di Kecamatan Lawang Kidul

Terdapat 7 desa di Kecamatan Lawang Kidul, dimana seluruhnya menerima dana bantuan PKH. Desa Tegal Rejo yang merupakan desa terbanyak yang mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2022 (Tahap I Jan-Feb) dengan jumlah 299 PKM. Sedangkan Desa Tanjung Enim Selatan merupakan desa yang paling sedikit mendapatkan bantuan sebesar 80 KPM. Berikut tabel jumlah penerima bantuan PKH per desa di Kecamatan Lawang Kidul.

**Tabel 3** Jumlah Penerima Bantuan PKH per Desa di Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2020-2022

No.	Desa/Kelurahan	2020	2021	2022 (Jan-Feb)
1	Darmo	147	169	183
2	Keban Agung	168	224	252
3	Lingga	104	142	179
4	Pasar Tanjung Enim	85	110	146
5	Tanjung Enim	127	169	204
6	Tanjung Enim Selatan	46	60	80
7	Tegal Rejo	181	243	299
	<b>Lawang Kidul</b>	<b>858</b>	<b>1117</b>	<b>1343</b>

Sumber: UPPKH Kecamatan Lawang Kidul

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lawang Kidul**

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lawang Kidul, yang difokuskan dengan mengidentifikasi variabel-variabel dari teori *Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier* yaitu (1) Mudah tidaknya permasalahan dikendalikan, (2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dan (3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Adapun hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

### **Variabel Mudah Tidaknya Masalah Yang Dikendalikan**

Kesukaran-Kesukaran Teknis Implementasi Program PKH

#### **1) Kendala Teknis Dalam Pelaporan Data Oleh Pendamping**

Kendala teknis yang terjadi di Kecamatan Lawang Kidul yang sering terjadi adalah keterlambatan laporan data dari pendamping ke operator dimana operator sebagai administrator, yang menyebabkan terjadi penguluran waktu untuk melaporkan data maupun menginput data yang akan dijadikan sebagai laporan oleh Operator kepada Koordinator Wilayah. Kendalanya diantaranya, dikarenakan jarak yang jauh dari tempat lokasi pendampingan dan jarak tempat tinggal pendamping juga jauh dari lokasi pendampingan, serta beberapa lokasi pendampingan termasuk ke dalam lokasi yang jaringan internet atau sinyal yang buruk. Sehingga menyebabkan banyak keterlambatan dalam pelaporan data dari lapangan. Kemudian, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak begitu besar untuk transportasi para pendamping. Sehingga, untuk mengurangi keterlambatan laporan pendataan dari pendamping, pendamping banyak bekerja lebih lama agar laporan selesai tepat waktu bahkan untuk mempercepat para pendamping menetap satu hari penuh di kantor Dinas Sosial.

#### **2) Kendala Teknis Pendistribusian dan Penggunaan Dana Bantuan Program PKH**

Kendala teknis dalam pendistribusian dana bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM mengalami beberapa hambatan diantaranya, dalam proses pendistribusian terkendal sistem jaringan di perbankan baik ATM atau pos Brilink setempat dan sering terjadi kepadatan antrian. Pada akhirnya pendamping harus mendampingi langsung dan mengatur langsung dengan mengumpulkan KPM ke tempat terdekat seperti warung-warung pos Brilink.

Dalam hal penggunaan dana bantaun PKH oleh KPM sering digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diperuntukannya, beberapa KPM belum bisa megelolah atau mengatur keuangan di keluarganya. Seharusnya dana bantuan PKH tersebut digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, tetapi sering digunakan untuk kebutuhan diluar ketentuan seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau merenovasi tempat tinggal yang sudah rusak. Kendala lain yang dihadapi oleh KPM, misalnya masih banyak anak sekolah yang tidak melanjutkan lagi sekolahnya atau berhenti sekolah karena melakukan pernikahan atau malu untuk datang ke sekolahkarean usia yang sudah besar jauh dari teman-temannya. Kendala lain yang juga dialami oleh pendamping yaitu saat melakukan observasi atau kunjungan ke rumah KPM, beberapa KPM ada yang berpindah-pindah rumah karena sebagian dari KPM masih kontrak rumah sehingga pendamping kesulitan menjumpai KPM.

### **Keberagaman Perilaku Yang Diatur Dalam Implementasi PKH**

Keberagaman perilaku yang diatur dalam program PKH baik yang dilakukan oleh penerima PKH atau KPM maupun pelaksana PKH (Opertaor, Koordintor, dan Pendamping) di Kecamatan Lawang Kidul dilakukan sesuai dengan kode etik serta aturan dan tujuan dari PKH. Operator, Koordintor, maupun Pendamping kooperatif, saling berkoordinasi dan supportif sesuai dengan tujuan dan kode etik yang ada. Pendamping mendampingi KPM, mengatur dan mengarahkan, memeberikan sosialisai, serta memberikan edukasi atau pembinaan kepada KPM.

Pendamping dalam menjalankan tugas utamanya yaitu melakukan pemutakhiran data. Pendamping harus mengetahui perkembangan para penerima atau KPM secara nyata. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping di Kecamatan Lawang Kidul bukan hanya saat pencairan dana bantuan PKH saja tetapi juga melakukan kunjungan-kunjungan rutin ke rumah para KPM dan pertemuan kelompok KPM setiap bulannya untuk mengedukasi, membina dan memberikan informasi-informasi kepada KPM agar dapat meningkatkan kualitas KPM. Kondisi

perilaku tersebut dapat membuat terwujudnya tujuan program PKH yaitu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada KPM baik itu dari kualitas pendidikannya maupun kesehatannya. Sehingga yang diterima oleh KPM dalam menjalankan komitmen menjadi kuat serta termotivasi untuk merubah kehidupan KPM-nya menjadi lebih baik lagi. Artinya, pelaporan serata pencatatan dari pendamping dalam melakukan pemutakhiran data dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.

Kemudian perilaku para peserta PKH atau KPM beraneka ragam karena berasal dari latar belakang dan sosial yang berbeda. Beberapa KPM menaati dan berperilaku sopan serta menghargai dari yang diberikan oleh pendamping. Tetapi, ada juga KPM yang belum paham sehingga memerlukan pendampingan yang lebih ekstra seperti, dari segi kesehatan cara mencuci tangan yang baik, penggunaan jamban atau kamar kecil yang bersih, kemudian dari segi pendidikan cara penggunaan uang bantuan untuk sekolah anak dan cara mengatur keuangan. Hal itu dilakukan agar para KPM dapat mengetahui dan mentaati sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari program PKH.

### **Tingkat Dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku Yang Dikehendaki**

Tingkat dan ruang lingkup perilaku perubahan perilaku yang dikehendaki dalam implementasi program PKH adalah dapat merubah pola hidup penerima PKH atau KPM dengan memajukan kesejahteraannya baik itu kesehatan maupun pendidikan. Ruang lingkup perubahan perilaku tersebut di Kecamatan Lawang Kidul sudah banyak yang terealisasi dengan baik sesuai tujuan dan aturan dari program PKH. Perubahan perilaku dalam kualitas pendidikan yang terlihat pada KPM di Kecamatan Lawang Kidul yaitu KPM sadar akan wajibnya pendidikan. Banyak dari KPM yang mulai memotivasi dan mengarahkan anak-anaknya untuk mulai bersekolah lagi. Dana bantuan yang diterima KPM untuk komponen pendidikan, telah terealisasikan dengan baik untuk kebutuhan sekolah anak seperti untuk membayar SPP, membeli pakaian sekolah, dan membeli buku.

Tetapi, masih ditemukan beberapa anak dari KPM yang berhenti sekolah karena melakukan pernikahan atau malu untuk bersekolah. Perilaku tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi dari orang tua atau lingkungan. Oleh karena itu, pendamping PKH melakukan pendampingan yang lebih lagi dan mengarahkan agar bisa kembali lagi bersekolah. Salah satu pendampingan yang dilakukan yaitu dengan mengunjungi rumah KPM tersebut dan memberi motivasi ke anak KPM agar bisa sekolah lagi. Kemudian melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah agar bisa mengetahui perilaku dari anak-anak KPM di sekolahnya.

Ruang lingkup dalam perubahan perilaku KPM atau penerima KPM untuk kesehatan yaitu perilaku pola hidup sehat. Banyak dari KPM yang mulai memahami pola hidup sehat sehari-hari, apalagi semenjak Indonesia maupun dunia mengalami pandemi Covid-19. Perubahan yang terlihat yaitu banyak KPM yang telah mengetahui cara mencuci tangan yang baik, penggunaan *jamban* yang bersih bukan lagi disungai, dan melakukan pelayanan kesehatan menggunakan sarana pelayanan yang ada seperti ibu hamil yang mulai sadar untuk mengontrol kandungannya setiap bulan.

### **Kemampuan Kebijakan Untuk Menstruktur Proses Implementasi**

#### **Kejelasan Dan Konsistensi Tujuan**

Dalam kejelasan dan konsistensi tujuan ini adalah untuk menganalisa dan mengamati peraturan program PKH. Peraturan dalam implementasi program PKH di Kecamatan Lawang Kidul mengacu pada pedoman pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2021. Para pelaksana baik itu pendamping, koordinator maupun operator dan pelaksana lainnya menjalankan peraturan sesuai tujuan dan kode etik yang ada dan terus berlanjut yang meliputi kewajiban, larangan dan etika didasari nilai-nilai santun, integritas dan profesional.

Kejelasan aturan-aturan yang ada dalam program PKH di Kecamatan Lawang Kidul dalam hal pemilihan peserta PKH dimana target penerima bantuan PKH adalah Keluarga Miskin sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Di Kecamatan Lawang Kidul pelaksanaan pemilihan peserta dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH yang ada dengan beberapa alur pelaksanaan, yaitu: (1) Perencanaan, dilakukan untuk mengetahui lokasi dan jumlah calon KPM

yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana pendamping bekerjasama dengan pihak desa, (2) Pertemuan Awal dan Validasi, pendamping melakukan pertemuan awal lalu melakukan pendataan awal melalui aplikasi e-PKH kemudian pendamping melakukan sosialisasi dan pelaksanaan validasi kelengkapan data, (3) Penetapan KPM PKH, hasil dari validasi kelengkapan data selanjutnya dikirim ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Harapan untuk dilakukan penetapan peserta PKH (4) Penyaluran Dana Bantuan Sosial, pendampingan dilakukan selama penyaluran dana bantuan sampai tersalurkan ke KPM, dan (5) Pemuktahiran Data, pendampingan melakukan pemuktahiran data melalui e-PKH setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan KPM PKH. Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Lawang Kidul, telah tercantum dalam aturan yang menjelaskan secara rinci dan konsistensi dengan tujuan PKH sudah terwujud dengan baik, beberapa mekanisme telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana baik itu pendamping, koordinator maupun operator PKH.

#### Dipergunakannya Teori Kasual

Variabel ini meninjau bagaimana perubahan kualitas masyarakat yang menerima manfaat dari program PKH atau KPM berfokus pada Program PKH untuk merealisasikan perubahan kualitas kehidupan di Kecamatan Lawang Kidul. Dalam tujuan PKH adalah membantu menurunkan kemiskinan dengan memajukan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat dilihat dari dampak keberhasilan PKH untuk mengevaluasi program PKH yaitu memajukan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial, yang artinya berkurangnya tingkat kemiskinan peserta PKH atau KPM setelah mengikuti pelaksanaan program PKH, berkurangnya kasus gizi buruk pada anak-anak usia balita setelah mengikuti program PKH. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari terjadi peningkatan konsumsi makanan berenergi serta berprotein setelah beberapa tahun mengikuti program PKH. Lalu, meningkatnya rata-rata lama bersekolah anak KPM serta meningkatnya partisipasi sekolah anak KPM setelah mengikuti program PKH.

Perubahan yang terjadi di Kecamatan Lawang Kidul yaitu KPM sudah mempunyai pendapatan yang stabil dengan bekerja seperti membuka online shop, membuka warung makanan atau manisan dan bekerja di restoran atau tempat makan. Kemudian, KPM sudah mulai sadar akan kebersihan dengan sudah membangun toilet bersih di rumah sendiri bukan lagi di sungai dan ibu hamil sudah melakukan cek kandungan ke dokter. Lalu, banyak anak-anak yang mulai melanjutkan sekolahnya dan orang tua sudah menegtahui pentingnya wajib sekolah 12 tahun. Berdasarkan implemenetasinya, perubahan yang terjadi di Kecamatan Lawang Kidul sudah memberikan perubahan kualitas yang baik dari segi pendidikan dan kesehatan yang sesuai tujuan PKH walaupun masih sering ditemukan beberapa kendala yang menghambat implementasi

#### Ketetapatan Alokasi Sumber Dana

KPM yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan lain diluar ketentuan. Konsep ini meninjau distribusi sumber dana yang dimanfaatkan dari para tim pendamping PKH untuk sampai ke penerima bantuan program PKH. Dana bantuan diberikan langsung disalurkan ke penerima bantuan/ KPM melalui rekening dan KPM dapat mencairkan uang bantuan melalui bank, ATM atau Brilink terdekat. Pihak operator dan pendamping tidak ikut campur dalam pencairan dana ke penerima bantuan. Pendamping hanya mendampingi penerima bantuan, jika ada masalah saat pencairan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pendistribusian dana PKH kepada KPM di Kecamatan Lawang Kidul diantaranya yaitu sistem yang mengalami *error* atau jaringan buruk sehingga mengalami keterlambatan saat pencairan dana, saat penyaluran bantuan banyak KPM yang masih memerlukan pendampingan mulai dari karena saldo 0, usia lanjut dan lokasi yang jauh dari ATM/ Brilink. Penggunaan dana PKH oleh KPM sering dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperuntukkan. Sering ditemukannya KPM yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan lain diluar ketentuan seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua maupun digunakan untuk merenovasi tempat tinggal yang sudah rusak.

### Keterpaduan Hierarki Dalam Lembaga Pelaksana

Dalam implementasinya di Kecamatan Lawang Kidul, koordinasi yang dilakukan oleh petugas dilapangan yaitu tim pendamping maupun dengan PKH yang terkait sudah berjalan dengan baik. Seperti dengan lembaga kecamatan, desa, RT/RW dan lembaga swadaya masyarakat saling berkoordinasi dan komunikasi yang terjalin sangat baik saat melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkup program PKH. Lembaga-lembaga atau dinas terkait mengetahui adanya agenda atau kegiatan-kegiatan PKH. Yang artinya, sosialisasi dan koordinasi serta komunikasi sangat kuat yang menyebabkan adanya dukungan dari lembaga-lembaga atau dinas tersebut.

### Aturan Pelaksana Dari Lembaga Pembuat Pelaksana

Aturan pelaksana dari lembaga pembuat pelaksana merupakan kejelasan dan kepatuhan dari masyarakat yang menerima bantuan dan lembaga-lembaga pelaksana PKH pada aturan dan yang telah dibuat dan ditetapkan dalam implementasi program PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Para pelaksana operator, koordinator, dan pendamping patuh serta menegetahui aturan dan tujuan dari program PKH yang diatur dalam SK kementerian sosial dan kode etik pendamping sosial. Sehingga proses pendampingan yang dilakukan maksimal dan sesuai dengan tujuan program PKH. Sedangkan dari KPM atau penerima bantuan PKH juga telah mengetahui aturan dan tujuan dari program PKH dengan disosialisasikan oleh penndamping yang berada dilapangan. Tetapi, sering ditemukan KPM yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan seperti penggunaan dana bantuan diluar dari ketentuan serta ditemukan juga KPM yang kondisi perekonomian baik, tempat tinggal yang bagus/layak, dan memiliki kendaraan mobil yang tidak sesuai dengan tujuan dari PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

### Perekrut Pejabat Pelaksana

Perekrutan pelkasna PKH ini dilakukan untuk mengetahui para pelaksana PKH menjalankan kesepakatan dan kepatuhan pada komitmen yang telah di syarkan untuk mencapai tujuan dari program PKH. Perekrutan calon pelaksana PKH yaitu calon pendamping, koordinator, dan operator PKH dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Sosial RI. Pedoman tersebut bertujuan agar proses rekrutmen dan seleksi para pelaksana PKH dilakukan secara transparan, obyektif, dan akuntabel yang bertujuan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Rekrutmen ini juga melibatkan pemerintah pusat dari kementerian Sosial RI dan juga melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Proses rekrutmen dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu publikasi, pendaftaran, pengumuman administrasi, pelaksanaan psikotes dan uji kompetensi, dan pengumuman hasil kelulusan.

Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Lawang Kidul ditemukan pendamping, koordinator maupun operator berkomitmen dan berintegrasi dengan baik dalam menjalankan kewajiban tugasnya. Karena ditemukan pendamping selalu bisa hadir di lokasi pendampingan baik saat sosialisasi, pertemuan kelompok sering dilakukan setiap bulannya dan pencairan dana serta saat KPM sedang mengalami masalah. Dengan begitu, pendamping mengetahui dan mengawasi sepenuhnya perkembangan dari KPM. Dan pendamping juga menjaga koordinasi dan relasi dengan kecamatan, desa, aparat setempat dan pemberi pelayan pendidikan dan kesehatan.

### Keterbukaan Terhadap Pihak Luar

Konsep ini dilakukan untuk menganalisa keterlibatan pihak luar terhadap pelaksanaan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul yang ikut terlibat dalam mendukung tujuan program PKH. Dalam pelaksanaan implementasinya, selalu melibatkan dan patisipasi dari masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, pihak desa, kecamatan, dan RT/RW setempat. Selalu menjaga koordinasi, interkasi dan selalu berkomunikasi serta menginformasikan kegiatan-kegiatan PKH sesuai dengan peraturan dan kode etik yang ada di PKH tetapi tertutup dalam hal data baik data penerima bantuan PKH maupun data lain karena takut terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, apabila ada kegiatan PKH, pihak-pihak terkait camat,



desa, serta pejabat RT/RW mengetahui kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut dapat dikatakan bahwa dukungan sangat terasa dari pihak-pihak terkait di luar dari tim pendamping dan petugas PKH. Sehingga program PKH berjalan dengan maksimal di Kecamatan Lawang Kidul.

### **Variabel Diluar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi**

Penilaian dari variabel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan teknologi mempengaruhi pencapaian tujuan dari program PKH. Sumber pencaharian masyarakat Kecamatan Lawang Kidul adalah bertani tanaman pangan, perkebunan juga kehutanan seperti buruh karet dan petani sayuran dan karyawan karena berada di area perusahaan tambang batu bara serta menjadi. Sedangkan mata pencaharian dari KPM di Kecamatan Lawang Kidul rata-rata adalah ibu rumah tangga, asisten rumah tangga (ART) atau tukang cuci/setrika, pedagang makanan/warung, dan pegawai restoran atau salon.

Untuk teknologi, seperti sarana komunikasi dan jaringan internet di Kecamatan Lawang Kidul di beberapa lokasi masih tergolong lemah terutama lokasi desa-desa perbatasan. Salah satu kesulitan yang dialami oleh pendamping dalam implementasi program PKH adalah pendamping sulit melakukan verifikasi atau menginput data ke aplikasi e-PKH karena keberadaan jaringan internet masih lemah. Tetapi, masyarakat Kecamatan Lawang Kidul sudah mulai melek teknologi seperti *handphone*, seperti saat pandemi Covid-19 tidak diperbolehkan adanya perkumpulan, pendamping mengkordinir dengan para KPM melalui video call di *whatsapp* agar komunikasi tetap terjalin dan pendamping mengetahui kondisi KPM.

### **Dukungan Publik**

Penilaian dari variabel ini adalah dengan melihat berupa dukungan dari warga atau masyarakat lain terhadap tujuan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Karena program PKH ini ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu dan memenuhi persyaratan pesert PKH. Dari msayarakat Kecamatan Lawang Kidul telah banyak mengetahui dan mendukung program PKH ini. Tetapi, terdapat masyarakat yang tidak mendukung terutama masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta PKH, dengan melakukan protes atau melapor ke dinas sosial kenapa tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, baik pendamping dan petgas PKH melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat tersebut serta masyarakat yang telah positif mendukung bisa mendorong secara nyata program PKH ini.

### **Sikap Dan Sumber-Sumber Yang Dimiliki Masyarakat**

Indikator ini untuk melihat atau menilai sikap dan sumber yang dimiliki warga kondusif atau tidak dalam mendukung program PKH. Dalam implementasinya, sebagian besar khususnya masyarakat yang menerima bantuan PKH dan menjadi KPM sangat mendukung dan kondusif dengan adanya program PKH. Sikap masyarakat secara umum sejauh ini dalam menyikapi keberlangsungan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul terlihat peduli dan ikut terlibat dalam program PKH. Selain itu, terdapat masyarakat terutama yang tidak menerima bantuan PKH atau tidak memenuhi persyaratan, tidak begitu mendukung program PKH, dengan melakukan protes dan melapor ke kantor dinas sosial serta di media sosial banyak komentar-komentar negatif yang tidak menyukai program PKH. Secara sosologis dan kearifan lokal, masyarakat Kecamatan Lawang Kidul terlibat dengan baik dalam program PKH seperti melibatkan tokoh masyarakat dan ulama.

### **Kesepakatan Dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana**

Indikator ini untuk mengetahui kesepakatan dan kemampuan interaksi pejabat pelaksana dengan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi aturan kebijakan PKH untuk menyukseskan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Para pelaksan PKH merealisasikan fungsi dari kemampuan aturan kebijakan PKH dan kemampuan berinteraksi dengan lembaga terkait untuk mencapai implementasi keebijakan PKH.

Dalam proses implementasi yang telah berjalan di Kecamatan Lawang Kidul, realisasi program PKH tersebut para pendamping atau petugas telah melakukan koordinasi untuk melibatkan pihak lain atau lembaga-lembaga terkait seperti pejabat kecamatan, perangkat desa, pejabat RT/RW, dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Dengan menjaga hubungan profesionalitas kerja, komunikasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan baik. Sehingga keberhasilan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul bisa terlaksana dengan baik dalam memperoleh tujuan dari program PKH, khususnya untuk membantu menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin.

### **Implementasi Bentuk Program PKH Dan Proses Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lawang Kidul**

Bentuk program PKH di Kecamatan Lawang Kidul yaitu bantuan untuk ibu hamil, anak sekolah, anak balita, dan lanjut usia serta disabilitas. Kemudian dilakukan pertemuan kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sudah dilakukan dengan baik. Pendampingan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang ada di PKH dan pendamping juga sangat bertanggung jawab. Pendamping selalu hadir jika ada kendala atau masalah seperti saat pencairan dan bantuan dari PKH. Pendampingan lain yang diberikan seperti kunjungan ke rumah dan pertemuan-pertemuan kelompok seperti P2K2 telah dilakukan secara rutin. Para pendamping otomatis ketika melakukan pendampingan juga memberikan motivasi kepada para peserta PKH atau KPM dalam menjalankan komitmennya.

#### **4. Simpulan dan saran**

Penilaian dari variabel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan teknologi mempengaruhi pencapaian tujuan dari program PKH. Sumber pencaharian masyarakat Kecamatan Lawang Kidul adalah bertani tanaman pangan, perkebunan juga kehutanan seperti buruh karet dan petani sayuran dan karyawan karena berada di area perusahaan tambang batu bara serta menjadi. Sedangkan mata pencaharian dari KPM di Kecamatan Lawang Kidul rata-rata adalah ibu rumah tangga, asisten rumah tangga (ART) atau tukang cuci/setrika, pedagang makanan/warung, dan pegawai restoran atau salon. Untuk teknologi, seperti sarana komunikasi dan jaringan internet di Kecamatan Lawang Kidul di beberapa lokasi masih tergolong lemah terutama lokasi desa-desa perbatasan. Salah satu kesulitan yang dialami oleh pendamping dalam implementasi program PKH adalah pendamping sulit melakukan verifikasi atau menginput data ke aplikasi e-PKH karena keberadaan jaringan internet masih lemah. Tetapi, masyarakat Kecamatan Lawang Kidul sudah mulai melek teknologi seperti *handphone*, seperti saat pandemi Covid-19 tidak diperbolehkan adanya perkumpulan, pendamping mengkoordinir dengan para KPM melalui video call di *whatsapp* agar komunikasi tetap terjalin dan pendamping mengetahui kondisi KPM. Penilaian dari variabel ini adalah dengan melihat berupa dukungan dari warga atau masyarakat lain terhadap tujuan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Karena program PKH ini ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu dan memenuhi persyaratan peserta PKH. Dari masyarakat Kecamatan Lawang Kidul telah banyak mengetahui dan mendukung program PKH ini. Tetapi, terdapat masyarakat yang tidak mendukung terutama masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta PKH, dengan melakukan protes atau melapor ke dinas sosial kenapa tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, baik pendamping dan petgas PKH melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat tersebut serta masyarakat yang telah positif mendukung bisa mendorong secara nyata program PKH ini. Indikator ini untuk melihat atau menilai sikap dan sumber yang dimiliki warga kondusif atau tidak dalam mendukung program PKH. Dalam implementasinya, sebagian besar khususnya masyarakat yang menerima bantuan PKH dan menjadi KPM sangat mendukung dan kondusif dengan adanya program PKH. Sikap masyarakat secara umum sejauh ini dalam menyikapi keberlangsungan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul terlihat peduli dan ikut terlibat dalam program PKH. Selain itu, terdapat masyarakat terutama yang tidak menerima bantuan PKH atau tidak

memenuhi persyaratan, tidak begitu mendukung program PKH, dengan melakukan protes dan melapor ke kantor dinas sosial serta di media sosial banyak komentar-komentar negatif yang tidak menyukai program PKH. Secara sosiologis dan kearifan lokal, masyarakat Kecamatan Lawang Kidul terlibat dengan baik dalam program PKH seperti melibatkan tokoh masyarakat dan ulama. Indikator ini untuk mengetahui kesepakatan dan kemampuan interaksi pejabat pelaksana dengan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi aturan kebijakan PKH untuk menyukseskan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul. Para pelaksana PKH menjalankan fungsi dari kemampuan dari aturan kebijakan PKH dan kemampuan berinteraksi dengan lembaga terkait untuk menyukseskan implementasi kebijakan PKH. Dalam proses implementasi yang telah berjalan di Kecamatan Lawang Kidul, realisasi program PKH tersebut para pendamping atau petugas telah melakukan koordinasi untuk melibatkan pihak lain atau lembaga-lembaga terkait seperti pejabat kecamatan, perangkat desa, pejabar RT/RW, dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Dengan menjaga hubungan profesionalitas kerja, komunikasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan baik. Sehingga keberhasilan program PKH di Kecamatan Lawang Kidul bisa terealisasi dengan baik mencapai tujuan dari program PKH, khususnya untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin.

### Daftar Rujukan

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id/> (Diakses November 6, 2021).
- Istiana, H. (2015). Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan. In *analisi teknologi acceptance model (TAM) terhadap tingkat penerimaan e-Learning pada kalangan mahasiswa*. 3(2). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Enim, B. P. S. K. M. (2021). *Kecamatan Lawang Kidul Dalam Angka 2021*.
- Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396>
- Muhammad, E. L. O. (2018). Implementasi program keluarga harapan (pkh) di kecamatan binongko kabupaten wakatobi. *Journal Publicuho*, 1(2), 1–17.
- PKH Kemensos. *Program Keluarga Harapan*. <https://pkh.kemensos.go.id/> (Diakses November 6, 2021).